

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH APIK AMANAH KELURAHAN LANGENSARI KABUPATEN SEMARANG

Kiki Oktaviana¹, Hardi Warsono², Endang Larasati Setianingsih³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Permasalahan mengenai pengelolaan sampah hingga kini belum bisa diatasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, program bank sampah dibentuk untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Salah satu wilayah di Kabupaten Semarang yang melaksanakan program tersebut adalah Kelurahan Langensari dengan membentuk Bank Sampah Apik Amanah, namun partisipasi masyarakatnya diduga belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat pada Bank Sampah Apik Amanah, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat serta menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasinya. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cukup berpartisipasi pada pengambilan keputusan, namun pada implementasi, pemanfaatan hasil dan evaluasi belum optimal. Tingkatan partisipasi masyarakat berada pada derajat semu (*tokenism*). Faktor pendorong partisipasi masyarakat yaitu pengetahuan, dukungan pemerintah dan tokoh masyarakat, SDM bank sampah yang kompeten serta perolehan insentif, sedangkan faktor penghambat yaitu pekerjaan dan keterbatasan sarana prasarana. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan penetapan regulasi; himbauan melalui SE Bupati, kampanye 3R, ajakan oleh pengurus bank sampah; serta edukasi melalui Program Sekolah Adiwiyata dan sosialisasi.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Bank Sampah, Pengelolaan Sampah melalui 3R

¹ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

² Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

³ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Until now, the government has not been able to overcome the problem of waste management. Therefore, the waste bank program was formed to create a community participation-based waste management system. One of the areas in Semarang Regency that implements the program is Langensari Village by forming the Apik Amanah Waste Bank, but community participation is suspected to be not optimal. This study aims to describe community participation in the Apik Amanah Waste Bank, identify factors related to community participation and analyze the efforts that have been made to increase participation. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the study show that the community participates in decision-making enough, but in implementation, utilization of results and evaluation is not optimal. The level of community participation is at a pseudo degree (tokenism). The driving factors for community participation are knowledge, support from the government and community leaders, competent waste bank human resources and the acquisition of incentives, while the inhibiting factors are work and limited infrastructure. Efforts to increase community participation are carried out by establishing regulations; appeals through the Regent's SE, 3R campaigns, invitations by waste bank administrators; and education through the Adiwiyata School Program and outreach.

Keywords: Community Participation, Waste Bank, Waste Management through 3R

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Pada tahun 2020 timbulan sampah Indonesia mencapai sekitar 67,8 juta ton, dimana 37,3% diantaranya berasal dari aktivitas rumah tangga (KLHK, 2020). Persoalan serupa juga dirasakan oleh banyak daerah di Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Semarang yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.053.786 (BPS Kabupaten Semarang, 2019). Banyaknya jumlah penduduk tersebut akan meningkatkan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada peningkatan produksi sampah. Kecenderungan ini diperparah dengan perkembangan aktivitas pembangunan serta semakin menurunnya daya dukung alam. Namun, perilaku masyarakat di Kabupaten Semarang dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih didominasi pada pengumpulan dan pembuangan ke TPA yaitu 34,6%, sedangkan sampah yang dikelola dengan cara didaur ulang memiliki angka presentase paling rendah yaitu 1,0%. Rendahnya kesadaran masyarakat juga terlihat dari tingginya angka pembakaran sampah yaitu 26%. Disisi lain, jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik atau dibuang pada tempat yang tidak semestinya seperti di kawasan pemukiman,

perkebunan, pekarangan, tepi jalan, badan sungai dan sebagainya juga cukup tinggi yaitu 22,7% (Laporan Utama IKPLH Kabupaten Semarang, 2019).

Upaya memperbaiki pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang dilakukan dengan perubahan sistem kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan dan penanganan sampah, hal ini sesuai dengan amanat dalam UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pendekatan tersebut bermaksud agar setiap orang termasuk masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat tersebut (Notoatmodjo, 2007). Secara lebih lanjut Cohen dan Uphoff (1980) mengungkapkan bahwa bentuk partisipasi dapat dilihat dari tahap pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui program bank sampah.

Bank sampah merupakan salah satu fasilitas pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular

yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, maupun pemerintah daerah (Permen LHK RI Nomer 14 Tahun 2021). Masyarakat yang selama ini dipandang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan dalam mengelola sampah kini telah mendapat *transfer of power* dari pelatihan dan pendidikan pengelolaan bank sampah yang diberikan pemerintah. Arnstein (dalam Muluk, 2007) berpendapat bahwa partisipasi yang diberikan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu *non-participation*, *tokenism* dan *citizen power*.

Penerapan program bank sampah di Kabupaten Semarang salah satunya dapat dilihat dari keberadaan Bank Sampah Apik Amanah. Bank Sampah Apik Amanah merupakan bank sampah pertama yang ada di Kelurahan Langensari sebagai wujud keprihatinan Ibu-Ibu PKK akan permasalahan sampah yang terjadi di sekitar lingkungan. Harapannya, melalui program ini masyarakat akan lebih sadar dan peduli terhadap kelestarian lingkungan dengan ikut mengelola sampah. Namun, peran Bank Sampah Apik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokus penelitian ini adalah Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari Kabupaten

Amanah ternyata belum dapat mengurangi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPS secara maksimal. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat pada pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah masih rendah seperti keterlibatan masyarakat sebagai nasabah yang hingga saat ini baru 65 nasabah, adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, keterbatasan sarana prasarana serta pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan pengelolaan bank sampah sempat terhenti karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada bank sampah merupakan hal yang sangat penting mengingat keterlibatan masyarakat akan berpengaruh pada keberjalanan bank sampah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakatnya serta menganalisis upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Semarang, sedangkan fokusnya adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan yaitu DLH Kabupaten

Semarang, Pemerintah Kelurahan Langensari dan masyarakat. Jenis data yang digunakan berupa kata-kata tertulis, kalimat, frasa-frasa yang dapat merepresentasikan perilaku atau tindakan yang terjadi di lapangan. Sumber data menggunakan data primer dari wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data sekunder dari arsip, dokumen dan jurnal. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kualitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari

A. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat pada penelitian ini akan dilihat melalui empat tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1980), sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari telah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui kegiatan musyawarah pada pertemuan perencanaan bank

sampah untuk menentukan pilihan alternatif-alternatif keputusan yang ada. Dalam penentuan keputusan partisipasi masyarakat diwakilkan oleh kepengurusan RT, kader PKK dan karang taruna RT. Inisiasi pembentukan bank sampah ini datang setelah perwakilan kader PKK Kelurahan Langensari mendapat pemahaman dari Program Bintek Pembentukan Lembaga Bank Sampah oleh DLH Kabupaten Semarang. Antusiasme masyarakat pada proses ini terlihat dari kehadiran mereka pada pertemuan perencanaan bank sampah dan keaktifan dalam memberikan ide, saran dan masukan pada tata kelola bank sampah.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah termasuk bentuk partisipasi pada pengambilan keputusan awal yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan program bank sampah melalui rapat perencanaan. Masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri, walaupun pada pengambilan

keputusan lebih banyak dilakukan oleh pengurus bank sampah.

b. Partisipasi dalam Implementasi

Partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari terlihat dari keterlibatan mereka untuk melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah dari rumah masing-masing. Selanjutnya sampah dibawa oleh masyarakat ke bank sampah untuk ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan bank sampah. Sampah-sampah pada bank sampah kemudian akan kembali dipilah, dibersihkan dan disimpan ke gudang oleh pengurus sebelum sebelum diambil oleh pengepul. Namun, untuk penyetoran sampah oleh masyarakat belum dilakukan secara rutin. Hal ini, disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu dan persaingan dengan pemulung yang menyediakan jasa penjemputan ke rumah-rumah warga sehingga hanya orang-orang tertentu yang mau membawa sampahnya ke bank sampah.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Bank Sampah Apik Amanah

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan bank sampah juga terlihat dari pemberian sumbangan buku-buku administrasi dan karung-karung sampah untuk mendukung pelaksanaan bank sampah. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini dilakukan secara sukarela karena bank sampah sendiri merupakan program sosial.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980) termasuk bentuk kontribusi sumber daya berupa barang dan tenaga. Kontribusi barang diwujudkan dengan memberikan buku-buku administrasi dan karung-karung sampah, sedangkan kontribusi tenaga dilakukan dengan meminjamkan tenaga untuk

melakukan pengelolaan sampah melalui pendaftaran sebagai pengurus maupun nasabah bank sampah. Sebagai pengurus masyarakat juga berperan dalam administrasi dan koordinasi pada kegiatan penimbang, pencatatan, pemilahan kembali sampah-sampah yang telah disetorkan oleh nasabah serta penjualan sampah ke pengepul. Namun, partisipasi masyarakat pada tahap ini diketahui belum optimal. Hal ini, terlihat dari sebagian besar pengurus yang kurang aktif berpartisipasi serta penyetoran sampah oleh nasabah tidak dilakukan secara rutin yang disebabkan oleh keterbatasan waktu serta persaingan dengan pemulung.

c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Hasil kegiatan pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari yang dapat dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari dua manfaat yaitu ekonomi dan sosial. Pertama, masyarakat yang tergabung dalam bank sampah merasakan manfaat ekonomi dari program tabungan yang dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau bisa kapan

saja. Namun, manfaat tersebut belum dapat dikatakan sebagai peningkatan pendapatan karena hanya mampu meringankan beban ekonomi tertentu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pamilutsh (2020) bahwa manfaat ekonomi dari program tunjangan hari raya pada bank sampah hanya dilakukan setahun sekali sehingga sifatnya belum dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakat setiap harinya. Kedua, manfaat sosial yaitu terjadi peningkatan kualitas hidup dimana lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat karena sampah sudah dikelola dari sumbernya. Fasilitas bank sampah telah mampu mengurangi jumlah sampah rumah tangga, mengurangi angka pembakaran sampah dan mengurangi munculnya serangga pembawa penyakit. Manfaat ini muncul dari adanya perubahan perilaku masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang tadinya langsung dibuang atau dibakar menjadi pengelolaan dengan pengurangan sampah melalui 3R.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam

pemanfaatan hasil pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980) dikategorikan sebagai bentuk manfaat ekonomi dan sosial. Manfaat ekonomi yang diperoleh berbeda-beda sesuai dengan pengorbanan masyarakat dalam kegiatan penyeteroran dan jenis sampahnya. Pada penelitian ini juga belum ditemukan adanya manfaat pribadi seperti harga diri, kekuatan politik dan rasa kemanjuran dari partisipasi yang diberikan dalam pengelolaan bank sampah.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Evaluasi pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari dilakukan melalui rapat internal bank sampah maupun bersama DLH Kabupaten Semarang atau Pemerintah Kelurahan Langensari setiap 6 bulan sekali. Keterlibatan masyarakat dilakukan oleh pengurus bank sampah, ketua RW dan RT, sedangkan masyarakat secara umum belum diberikan kesempatan untuk ikut menyuarakan kritik dan saran dalam proses evaluasi. Pada tahap ini salah satu kendala yang sering

disampaikan, yaitu belum ada bantuan dana dari pemerintah untuk gedung bank sampah yang kini kondisinya sudah mulai rusak. Namun, partisipasi masyarakat menjadi terhambat karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan evaluasi dengan pertemuan menjadi terhenti.

Hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980) termasuk bentuk partisipasi secara langsung melalui pertemuan evaluasi dari internal bank sampah maupun bersama pemerintah setiap 6 bulan sekali, namun partisipasi masyarakat diketahui belum optimal karena hanya melibatkan beberapa orang saja.

B. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi merupakan penilaian atau pengukuran tinggi rendahnya partisipasi yang telah dicapai. Penelitian ini menggunakan teori derajat partisipasi Arnstein (dalam Muluk 2007), yaitu *non participation*, *tokenism* dan *citizen power*.

a. *Non Participation*

Tingkatan terendah yaitu *non participation* diketahui tidak tercapai pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah. Hal ini terlihat dari karakteristik pada anak tangga *manipulation* dan *therapy* yaitu sebagai permainan pemegang kekuasaan untuk sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan dinilai tidak sesuai dengan hasil penelitian. Masyarakat telah mendapat informasi tentang program bank sampah dari DLH Kabupaten Semarang dari kegiatan sosialisasi dan surat edaran yang disampaikan secara berjenjang, jadi masyarakat memperoleh informasi dari RW, RT atau kader PKK.

b. *Tokenism*

Tokenism merupakan tingkatan partisipasi yang menunjukkan adanya dialog atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pada tingkatan ini terdapat tiga anak tangga yaitu *informing*, *consultation* dan *placation*.

Anak tangga *informing* yaitu adanya komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat diketahui sudah tercapai. DLH

Kabupaten Semarang telah memberikan informasi tentang program bank sampah melalui SK Bupati, sosialisasi, Bintek dan e-brosur kepada perwakilan kader PKK di Kelurahan Langensari. Kader ini lah yang nantinya akan kembali menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pertemuan RW, RT maupun PKK.

Anak tangga *consultation* yaitu adanya komunikasi yang bersifat dua arah dimana masyarakat sudah dapat memberikan usulan, walaupun sarannya tidak selalu diterima diketahui juga sudah tercapai. DLH Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kelurahan Langensari telah melakukan kegiatan dengar pendapat bersama masyarakat pada saat pembimbingan, monitoring maupun pertemuan evaluasi bank sampah. Pada kegiatan tersebut masyarakat sudah menyampaikan ide, saran, masukan, perkembangan atau kendala dalam pelaksanaan bank sampah. Namun, karena adanya pandemi Covid 19 kegiatan dengar pendapat menjadi terbatas dan komunikasi dari masyarakat dilakukan secara tidak langsung oleh pengurus Bank Sampah Apik

Amanah secara daring melalui *WhatsApp*.

Anak tangga tertinggi pada tingkatan partisipasi *tokenism* yaitu *placation* diketahui sudah tercapai. *Placation* menunjukkan adanya pelibatan masyarakat sebagai anggota komite dalam program, namun saran dari masyarakat tidak selalu dilakukan. Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah telah melibatkan masyarakat sebagai anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). KSM ini termasuk dalam anggota kepengurusan Bank Sampah Apik Amanah yang telah disahkan melalui SK Lurah Langensari Nomer 147/02.1/2018, dimana keterlibatan masyarakat berasal dari perwakilan kader PKK, Ketua RT dan Ketua RW.

c. *Citizen Power*

Citizen power merupakan tingkatan partisipasi yang paling nyata dimana terjadi redistribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Pada tingkatan ini terdapat tiga anak tangga yaitu *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*.

Anak tangga *partnership* yaitu adanya negosiasi antara pemerintah dengan masyarakat dimana terdapat mekanisme memberi dan

menerima diketahui sudah tercapai. DLH Kabupaten Ssemarang sudah menjalin kemitraan dengan kader PKK dan Ketua RT dalam pengelolaan bank sampah dengan membentuk KSM atau kepengurusan Bank Sampah Apik Amanah untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam penyelenggaraan bank sampah. Pemerintah juga memberikan pendampingan dengan menyediakan Tenaga Fasilitator Bank Sampah.

Anak tangga *delegated power* yaitu adanya pemberian sebagian kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat diketahui sudah tercapai. Masyarakat di Kelurahan Langensari telah diberikan sebagian kewenangan oleh pemerintah untuk pelaksanaan pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah, sedangkan pemerintah berperan sebagai pendampingan, pembuat kebijakan, monitoring dan pengawasan serta berupaya memberikan dukungan sarana prasarana kepada bank sampah.

Citizen control yaitu tingkat tertinggi dimana masyarakat telah diberikan kendali penuh atas suatu program mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diketahui

belum tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat campur tangan pemerintah pada perencanaan dan evaluasi dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah, walaupun pada pelaksanaannya sudah sepenuhnya diserahkan kepada pengurus. Pada perencanaan bank sampah terlihat dari awal mula bank sampah berasal dari program pemerintah sehingga inisiasi masyarakat baru muncul setelah ada pendampingan oleh DLH Kabupaten Semarang. Kemudian pada evaluasi pemerintah masih ikut terlibat sebagai pengawas dengan melakukan monitoring dan evaluasi bank sampah secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat pada evaluasi juga masih terbatas dari pengurus bank sampah saja sedangkan masyarakat secara umum belum diajak berdiskusi.

Berdasarkan hasil analisis di atas diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari berada pada tingkatan *tokenism*. Hal ini terbukti dari terpenuhinya karakteristik pada anak tangga *informing*, *consultation*, dan *placation* yaitu sudah ada

pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat terkait pengelolaan bank sampah melalui SK Bupati Kabupaten Semarang, sosialisasi, Bintek dan e-brosur. Antara pemerintah dengan masyarakat juga sudah terdapat komunikasi dua arah melalui kegiatan dengar pendapat pada saat saat pembimbingan, monitoring maupun pertemuan evaluasi bank sampah serta masyarakat (perwakilan kader PKK, Ketua RW dan RT) telah dilibatkan sebagai anggota komite dalam KSM atau pengurus Bank Sampah Apik Amanah. Namun, secara keseluruhan partisipasi masyarakat sudah mencapai tingkatan *citizen power* pada anak tangga *delegated power* karena pemerintah telah memberikan kewenangan kepada pengurus bank sampah untuk implementasi pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari

a. Faktor Pendorong

Faktor internal yang menjadi pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah yaitu pengetahuan. Masyarakat akan memiliki kesadaran akan pentingnya

pengelolaan sampah apabila mereka mempunyai pengetahuan yang baik tentang kegiatan pengelolaan sampah itu sendiri (Laor dalam Yuliana, 2019). Hasil penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Langensari yang terlibat pada bank sampah sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan sampah. Pengetahuan tersebut diperoleh dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah maupun pengurus bank sampah di masing-masing wilayah. Sedangkan faktor eksternal yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah, meliputi:

a) Dukungan dari Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

Besar kecilnya dukungan yang diberikan pemerintah maupun tokoh masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. Pemerintah dan tokoh masyarakat sangat mendukung dan memperhatikan kondisi bank sampah. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang seperti ATK, meja, kursi dan timbangan yang

berasal dari kepengurusan RW maupun Kelurahan. Kemudian terdapat dukungan informasional dari Ketua RW dan RT dengan memberikan pengumuman setiap ada kegiatan bank sampah. DLH Kabupaten Semarang juga memberikan dukungan pendamping, pembinaan dan monitoring bank sampah. Adanya berbagai dukungan tersebut menjadi motivasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada Bank Sampah Apik Amanah. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Pamilutseh (2020) bahwa faktor eksternal yaitu dukungan pemerintah menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat karena tingkat dukungan pemerintah khususnya pemerintah desa masuk ke dalam kategori rendah.

b) Pengelola (SDM) Bank Sampah

SDM merupakan salah satu unsur penting yang berperan untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. SDM bank sampah diidentifikasi sebagai faktor

pendukung yang mempengaruhi masyarakat di Kelurahan Langensari untuk berpartisipasi pada Bank Sampah Apik Amanah. Pengelola bank sampah diketahui terdiri atas kader PKK yang dikenal sebagai penggerak dan memiliki semangat tinggi untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi pada kegiatan pemberdayaan. Pengelola bank sampah juga sudah mampu menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab atas jabatan yang mereka miliki.

c) Insentif

Insentif dikategorikan sebagai faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya tambahan penghasilan dari hasil penjualan sampah yang dapat meringankan beban untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Pengembangan inovasi dalam pemberian insentif dalam program bank sampah perlu dilakukan untuk memacu semangat masyarakat dalam

mengelola sampah (Amalia, 2020: 320).

b. Faktor Penghambat

Faktor internal yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah yaitu pekerjaan. Latar belakang pekerjaan yang dimiliki seseorang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat pada pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah. Masyarakat di Kelurahan Langensari sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta pada sektor industri tekstil (garmen) dengan waktu kerja yang padat. Hal ini membuat mereka tidak memiliki waktu untuk memilah sampah apalagi harus membawa sampahnya ke bank sampah. Analisis penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian oleh Yuliana (2019), yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan pekerja, namun mereka masih sempat untuk memilah sampah dibandingkan responden yang tidak bekerja.

Sedangkan faktor eksternal yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah yaitu keterbatasan sarana prasarana.

Tidak semua masyarakat di RW 05 Kelurahan Langensari bisa membawa sampah ke bank sampah terutama bagi mereka yang rumahnya jauh dari lokasi penimbangan sehingga muncul keinginan agar bank sampah menyediakan layanan penjemputan sampah ke rumah, akan tetapi bank sampah tidak memiliki armada pengangkutan sampah. Selain itu, kegiatan bank sampah juga masih terbatas pada pemilahan sampah saja mengingat keterbatasan gedung serta belum ada mesin pencacah seperti Bank Sampah Soka Resik, Bank Sampah Lumbang Sejahtera dan beberapa bank sampah lainnya yang sudah mendapat bantuan sarana prasarana dari DLH Kabupaten Semarang

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari

a. Upaya Paksaan

Menurut Notoatmodjo (2010) upaya partisipasi dengan paksaan yaitu cara meningkatkan partisipasi dengan cara memaksa seseorang untuk terlibat pada kegiatan maupun program melalui penetapan peraturan maupun dengan perintah yang dilakukan oleh

pihak yang berwenang. Upaya paksaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah dilakukan dengan pembuatan plang-plang larangan membuang sampah sembarangan oleh Perangkat RW 05 di Kelurahan Langensari. Selain itu, terdapat upaya regulasi yang mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari hak, kewajiban, larangan hingga pemberian sanksi bagi pelanggarnya melalui Perda Kabupaten Semarang Nomer 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perda Kabupaten Semarang Nomer 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH. Namun, upaya ini belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara maksimal karena penegakan sanksi masih lemah.

b. Partisipasi dengan Persuasi

Notoatmodjo (2010) mendefinisikan partisipasi dengan persuasi sebagai perwujudan partisipasi yang dilakukan atas dasar kesadaran dari dalam individu. Upaya persuasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah termasuk pada Bank Sampah Apik Amanah dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Semarang melalui penerbitan Surat Edaran Nomer: 660.1/01679/2019 tentang Himbauan Pengurangan Penggunaan Plastik agar perangkat daerah/ instansi/ rumah/ sakit/ puskesmas/ perusahaan melaksanakan kegiatan pengurangan penggunaan plastik dengan menggunakan kemasan atau pembungkus berbahan organik yang mudah terurai serta menggunakan tumbler. Selain itu terdapat kebijakan dan strategi daerah dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah salah satunya melalui *campaign* 3R yang diatur dalam PERBUP Semarang Nomer 6 Tahun 2019. Dalam hal ini, pengurus bank sampah juga aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan memberikan pemberitahuan rutin tentang pelaksanaan kegiatan bank sampah secara online melalui *Whatsapp Group* maupun secara langsung pada pertemuan-pertemuan warga.

c. Partisipasi dengan Edukasi

Edukasi atau pendidikan hakikatnya merupakan suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan kepada masyarakat atau individu agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik (Notoatmodjo, 2007). Upaya edukasi untuk meningkatkan

partisipasi dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah dilakukan melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal dilakukan melalui Program Sekolah Adiwiyata sebagai perwujudan kerjasama antara DLH Kabupaten Semarang dengan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pendidikan informal dilakukan dengan sosialisasi atau penyuluhan kepada internal bank sampah dan masyarakat pada pertemuan-pertemuan PKK, RT dan Dasawisma. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dengan edukasi telah termuat pada PERBUP Semarang Nomer 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari empat bentuk partisipasi masyarakat diketahui bahwa dalam implemementasi, pemanfaatan hasil dan evaluasi pada pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di Kelurahan Langensari

belum optimal. Pada implementasi, bentuk partisipasi tenaga sebagai nasabah dalam penyetoran sampah tidak dilakukan secara rutin, sedangkan sebagai pengurus dalam administrasi dan koordinasi juga masih rendah. Bentuk partisipasi pada pemanfaatan hasil berupa manfaat ekonomi juga belum dapat dinilai sebagai peningkatan pendapatan yang mampu meringankan beban ekonomi sehari-hari. Kemudian bentuk secara langsung pada evaluasi belum mencerminkan partisipasi masyarakat secara umum. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat sudah berada pada tingkatan *tokenism*.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah di dorong oleh faktor internal yaitu pengetahuan dan faktor eksternal yaitu adanya dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat, SDM bank sampah kompeten, dan perolehan insentif, sementara faktor penghambat dari internal yaitu pekerjaan dan faktor eksternal yaitu keterbatasan sarana prasarana. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah, namun upaya paksaan melalui regulasi belum optimal karena penegakan sanksi masih lemah dan upaya edukasi dinilai masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. 2020. Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2): 306–323. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.613>
- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *JAIP*, 35(4): 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cohen JM & Uphoff N. 1980. *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity*. World Development. New York (US): Cornell University.
- Muluk, Mujibur R.K. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem)*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamilutseh, Kiki. 2020. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Keberlanjutan Pengelolaan Bank Sampah Di Desa Tuwel , Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 4(5): 663-677. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.6>.
- Yuliana, Ina. (2019). Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 3(4): 545-555. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah

Permen LHK RI Nomer 14 Tahun 2021
Tentang pengelolaan Sampah Pada
Bank Sampah

Perda Kabupaten Semarang Nomer 2
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Perda Kabupaten Semarang Nomer 1
Tahun 2018 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Semarang Nomer 6
Tahun 2019 tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Laporan Utama IKPHD Kabupaten
Semarang 2019